BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Mencari beberapa kumpulan penelitian yang terkait kemudian diangkat untuk mendukung penelitian yang dibuat agar penelitian semakin menguat. Kajian Pustaka meliputi pengidentifikasian secara sistematis, penemuan dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2.2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menujukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan.

Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian penulis sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan. Karena penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memanfaatkan dan

mengembangkan penelitian sebelumnya secara efektif, dan terus memperluas teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian yang dilakukan.

Penelitian terdahulu juga dapat berfungsi sebagai sumber kreativitas yang nantinya dapat membantu peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Penelitian terdahulu akan memudahkan kita dalam menentukan langkah – langkah yang sistematis untuk menyusun sebuah penelitian. Peneliti memilih tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Program Perpustakaan Keliling, yaitu penelitian dari Novita Dwiyanti (2020), penelitian Mohammad Reza Pradana (2016), dan penelitian Vivi Friskila Angela (2024).

1. Penelitian Novita Dwiyanti (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Dwiyanti (2020) dengan judul "Implementasi Budaya Literasi Oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo". Hasil penelitian menjelaskan Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo, dengan berbagai teknik komunikasi melalui banner, perpustakaan keliling ke desa – desa seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo, stiker dan media radio. Terdapat kejelasan komunikasi dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas terkait.Disamping itu, materi sosialisasi terdapat konsistensi dalam penggunaan pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan.Sedangkan dilihat sumber daya yang sudah ada perlu ditambah lagi, khususnya sumber daya peralatan seperti penambahan peralatan alat komunikasi digital, sehingga para pelaksana/petugas diharapkan mampu menggunakan teknologi informatika secara baik dalam melaksanakan teknis operasionalnya, lebih cepat dan efisien.

Harapannya untuk mempermudah mengakses buku – buku terbitan baru serta pelayanan pegawai terhadap pengunjung perpustakaan diharapkan lebih

komunikatif. Dari sudut pandang, disposisi/sikap pelaksana kebijakan perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam hal pemberian insentif dan promosi karir, sehingga pegawai dari sudut pandang, disposisi/sikap pelaksana kebijakan perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam hal pemberian insentif dan promosi karir, sehingga pegawai yang terlibat dalam implementasi kebijakan budaya literasi lebih termotivasi dalam menjalankan kebijakan tersebut. Kemudian Struktur Birokrasi perlu dilakukan pembenahan, meskipun selama ini prosedur pelayanan yang diberikan sudah cukup baik dan terjamin kualitas mutunya, tentunya masih ada hal yang perlu disempurnakan untuk menghadapi beberapa hambatan dan kendali dilapangan dan disesuaikan tuntutan kemajuan jaman, sehingga lebih optimal dalam pelaksanaan kebijakan Implementasi Budaya Literasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo.

Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pendekatan implementasi kebijakan yang mengacu pada teori George C. Edwards III. Kedua penelitian menyoroti empat variabel utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan program perpustakaan keliling di Kota Bandung mengutamakan komunikasi yang jelas melalui berbagai media, serupa dengan strategi yang diterapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo yang menggunakan banner, stiker, media radio, dan perpustakaan keliling dalam sosialisasi budaya literasi. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti pentingnya peningkatan sumber daya, baik dalam bentuk peralatan maupun pengembangan teknologi informasi, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan perpustakaan. Disposisi pelaksana dan dukungan insentif bagi pegawai juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan,

sebagaimana yang dikemukakan dalam kedua penelitian. Struktur birokrasi yang perlu diperbaiki untuk mengatasi hambatan di lapangan juga menjadi perhatian dalam penelitian ini maupun penelitian Novita Dwiyanti, dengan tujuan agar kebijakan literasi dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

2. Penelitian Shafira Azahra (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Shafira Azahra (2023) dengan judul "Implementasi Kebijakan Meningkatkan Literasi Generasi Muda di Kota Tangerang Selatan". Implementasi kebijakan peningkatan literasi generasi muda di Kota Tangerang Selatan telah berjalan cukup baik dengan dukungan sumber daya yang memadai, kinerja pegawai yang optimal, serta sarana dan prasarana yang layak. Komitmen pemerintah daerah dan stakeholder terlihat kuat, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan minat baca masyarakat, terutama generasi muda. Komunikasi antarorganisasi telah dilakukan secara terstruktur melalui sosialisasi perpustakaan dan pembangunan Taman Baca Masyarakat (TBM). Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lingkungan sosial yang kondusif, sehingga kolaborasi antara pemerintah, stakeholder, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan budaya literasi yang berkelanjutan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penilitian ini terletak pada analisis implementasi kebijakan menggunakan teori yang menekankan pada faktor – faktor keberhasilan kebijakan. Penelitian ini mengacu pada teori George C. Edwards III yang menyoroti empat faktor utama dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Sementara itu, penelitian Shafira Azahra (2023) menggunakan teori Van Meter dan Carl Van

Horn yang mencakup enam dimensi keberhasilan kebijakan, termasuk komunikasi antarorganisasi, sumber daya, serta sikap pelaksana. Kedua penelitian sama – sama menyoroti pentingnya koordinasi antarstakeholder, dukungan sumber daya yang memadai, serta komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan peningkatan literasi. Selain itu, komunikasi yang efektif dan lingkungan sosial yang mendukung juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan di kedua penelitian.

3. Penelitian Helly Sindiliani Rizkia (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Helly Sindiliani Rizkia (2020) dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung". Berdasarkan hasil analisis, implementasi kebijakan pengelolaan perpustakaan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung telah berjalan cukup baik menurut pegawai dinas dan masyarakat sebagai pengunjung. Namun, masih terdapat kekurangan dalam aspek komunikasi, terutama dalam penyampaian informasi melalui media sosial, serta dalam sumber daya, baik dari segi tenaga kerja maupun sarana dan prasarana. Dalam dimensi komunikasi, transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi telah berjalan cukup baik, tetapi pemanfaatan media sosial perlu ditingkatkan karena masyarakat masih merasa kurang mendapatkan informasi. Dari segi sumber daya, terutama dalam aspek staf dan fasilitas, masih perlu perbaikan baik secara kualitas maupun kuantitas untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Sementara itu, dalam aspek disposisi, implementasi kebijakan telah berjalan sesuai aturan, termasuk dalam hal pengangkatan birokrat dan pemberian insentif. Struktur birokrasi juga telah diterapkan dengan baik melalui SOP dan sistem fragmentasi yang jelas, sehingga tugas dan tanggung jawab setiap bidang telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Persamaan penilitian terdahulu dengan penilitian ini yang dilakukan oleh Helly Sindiliani Rizkia (2020) dalam mengkaji implementasi kebijakan

perpustakaan, khususnya dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kedua penelitian menyoroti bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat kendala yang harus diatasi agar layanan lebih optimal. Dalam aspek komunikasi, penelitian Rizkia menemukan bahwa meskipun informasi telah disampaikan dengan cukup baik, pemanfaatan media sosial masih kurang efektif, yang juga menjadi temuan dalam penelitian ini mengenai perpustakaan keliling di Kota Bandung. Dari sisi sumber daya, kedua penelitian mencatat bahwa tenaga kerja serta sarana dan prasarana masih belum mencukupi, sehingga mempengaruhi kualitas layanan. Selain itu, aspek disposisi dalam kedua penelitian menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur, sedangkan struktur birokrasi telah diterapkan dengan baik, meskipun masih memerlukan penyempurnaan untuk meningkatkan efisiensi. Kesamaan ini menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasi kebijakan perpustakaan, baik yang bersifat tetap maupun keliling, masih memerlukan peningkatan di berbagai aspek agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1.	Novita Dwiyanto (2020)	Implementasi Budaya Literasi Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo	Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori menurut George Edwards III dalam (Iskandar Jusman, 2005, 97) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila terdapat 4 (empat) faktor kritis yang mendukung, meliputi : 1. dimensi komunikasi, 2. dimensi sumber daya, 3. dimensi disposisi atau sikap, dimensi struktur birokrasi.	Deskriptif Kualitatif	Metode Kualitatif	Teknik Analisis Data menggunakan untuk pengumpulan data, analisis data, verifikasi data dan kesimpulan serta perumusan hasil
2.	Shafira Azahra (2023)	Implementasi Kebijakan Meningkatkan Literasi Generasi Muda di Kota Tangerang Selatan	Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Carl Van Horn terdapat 6 dimensi keberhasilan yaitu : 1. ukuran dan tujuan kebijakan 2. sumber daya 3. karakteristik agen pelaksana 4. sikap dan kecenderungan (disposition) para pelaksana 5. komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana	Deksriptif kualitatif	Metode kualitatif	Teknik Analisis Data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
			lingkungan ekonomi, sosial dan politik			
3.	Helly Sindiliani Rizkia (2020)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung	Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori menurut George Edwards III terdapat 4 faktor dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu : 1. komunikasi 2. sumber daya 3. disposisi 4. struktur birokrasi	Dekriptif Kualitatif	Metode Kualitatif	Teknik Analisis Data menggunakan studi kependudukan, dan studi lapangan yang melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi

2.2 Kajian Terhadap *Grand Theory*

2.2.1 Pengertian Administrasi

Administrasi berasal dari bahasa Latin atau Yunani, yaitu: ad yang memiliki arti intensif dan ministrare memiliki arti melayani, membantu dan memenuhi. Administrasi adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengaturan suatu organisasi, baik itu organisasi bisnis, pemerintah, maupun organisasi non – profit. Intinya, administrasi adalah tentang bagaimana cara mengelola sumber daya yang ada (manusia, keuangan, material, dan informasi) untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Administrasi dapat diartikan sebagai sebuah proses pengorganisasian sumber – sumber baik sumber daya manusia ataupun yang lainnya sehingga dengan adanya hal tersebut tugas masing – masing orang dalam organisasi tersebut dapat dikerjakan dengan baik.

Pengertian administrasi menurut (Admosoedirjo, 1986) secara luas dapat dilihat dari tiga sudut pandang, sebagai berikut: Arti administrasi pada institusional, administrasi diartikan sebagai seluruhan orang atau kelompok yang secara bersama melakukan kegiatan – kegiatan guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Administrasi dalam arti fungsional/tugas, administrasi adalah suatu keseluruhan kegiatan dan tindakan yang maksudnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengertian Administrasi menurut The Liang Gie (2000) mengemukakan Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan dalam suatu organisasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut George R. Terry (2003) mengemukakan Administrasi adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Dr. Sondang Siagian (2008) mengemukakan Administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasrkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu proses kerja sama yang terogranisir antara dua orang atau lebih, yang melibatkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan berbagai sumber daya, dengan tujuan untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam Buku Dr. Isnaini Rodiyah, Hendra Sukmana, dan Lailul Mursyidah tahun terdapat definisi administrasi menurut para ahli sebagai berikut : Gulick and Urwick (1937) menyampaikan bahwa "*administration has to do with getting things done, with the accomplishent of defined objectives*" yang artinya administrasi

merupakan penyelesaian yang hendak dikerjakan, dengan tercapainya tujuan yang telah di tetapkan.

a. White (1955) menyampaikan bahwa "*administration is a process common to all group effort, public or private, civil or military, large scale or small scale*" yang artinya administrasi merupakan sebuah proses yang terus berada pada setiap usaha kelompok, publik atu privatm sipil atau militer, skala besar atau skala kecil. terdapat dua hal penting pada pendapat ini yaitu administrasi merupakan sebuah proses dan keseluruhan proses tersebut berada pada setiap usaha kelompok.
b. Pfiffner and Robert (1960) menyampaikan bahwa "*administration is a general process wich characterizes all collective effort*" yang artinya administrasi adalah suatu orises umumyang menandai semua usaha bersama.
c. Waldo (1971) menyampaikan bahwa administrasi merupakan suatu upaya yang kooperatif, yang memiliki tingkat rasionalitas yang tinggi.
d. Robbins (1978) menyampaikan bahwa "*administration is the universal process of effviently getting activities copleted with and though other people*" yang artinya administrasi merupakan sebuah proses yang universal dalam aktivitas pencapaian tujuan secara efisien dengan dan melalui orang lain.
e. Nawawi (1990) menyampaikan bahwa administrasi merupakan sebuah kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sebuah kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
f. Dimock (1992) administrasi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari apa kehendak rakyat melalui pemerintah dan cara bagaimana hal tersebut diperoleh.
g. Gie (1993) administrasi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok manusia sebagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu.

h. Simon (1997) menyampaikan bahwa "*administration can be defined as the activities of groups cooperating accomplish common goal*" yang artinya administrasi adalah kagiatan sekelompok orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
i. Siagian (2008) menyampaikan bahwa administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapaitujuan yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan sebuah proses usaha kerjasama antara dua orang atau lebih berdasar rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.

2.2.2 Pengertian Administrasi Publik

Administrasi Publik adalah ilmu sosial yang mempelajari bagaimana mengatur dan mengelola urusan negara atau pemerintahan. Ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari pembuatan kebijakan, pelaksanaan program, hingga pelayanan publik.

(Nicholas Henry *et al*., n.d.) dalam buku deddy mulyadi mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubunganya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melambangkan praktik praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas dan efisiensi.

Menurut Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig (1960), Administrasi Publik merupakan pekerjaan yang ada di pemerintah yang di dalamnya melakukan kekuasaan politiknya. Sedangkan menurut Menurut Dimock (1992) mengemukakan bahwa :

> "Administrasi publik adalah bagian dari administrasi secara umum dan memiliki jangkauan yang lebih luas. Dimana administrasipublik mempelajari ilmu pengetahuan mengenai lembaga terkecil seperti keluarga hingga perserikatan bangsa – bangsa disusun, digerakkan dan dijalankan. Administrasi publik sebagai pennetu kebijaksaan suatu negara karena administrasi merupakan bagian dari ilmu politik. oleh karenanya, administrasi publik memiliki dua syarat jika hendak dipelajari. Syarat yang pertama yaitu mengetahui tentang administrasi umum. Kedua yaitu mengakui bahwa banyak masalah administrasi publik yang timbul dalam politik."

Pendapat yang disampaikan oleh Siagian (1994) "Administrasi publik merupakan seluruh proses suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan terlibat dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai."

Menurut Robbins (1983) juga menyampaikan bahwa "*administration in the universal proces of vilociency getting activities completed with and through other people*" yang artinya administrasi merupakan proses keseluruhan dari suatu aktivitas pencapaian sebuah tujuan secara efisien dan melalui orang lain.

Menurut Handayaningrat, 1985 juga menyampaikan administrasi sebagai "*a process common to all group effort public or private, civil or military, large scale or small scale..*" yang artinya sebuah proses yang umum terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha besar atau kecil serta lain sebagainya.

Menurut Silalahi (1989) mengutip Thead menyampaikan bahwa "*Administration is conceived as the necessary activities of these individuals in an organization who change with ordering, forwarding and facilitating the associate efforts of group o individuals brought together to realize certain devined purpose*" artinya administrasi meliputi seluruh kegiatan individu pada

suatu organisasi yang memiliki tugas dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu proses pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai lembaga negara, yang melibatkan kerja sama antar individu dan kelompok untuk merumuskan kebijakan, mengelola program, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan tujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Serta yang menjadi tugas utama dari administrasi publik adalah merencanakan dan merumuskan kebijakan politik dan kemudian melaksakannya. Oleh sebab itu, terdapat tiga makna mengenai administrasi publik sebagai berikut:

2.1 Administration of public, dapat menunjukkan peran pemerintah sebagai agen tunggal yang memiliki kekuasaan atau sebagai regulator yang selalu aktif dalam mengatur serta mengambil sebuah keputusan. Pada makna ini masyarakat dianggap sebagai masyarakat yang pasif dan menuruti kehendakpemerintah.

2.2 Administration for public, dalam hal ini menunjukkan bahwa pemetintah lebih yang artinya pemerintah memiliki peran dalam melaksanakan pelakyanan publik. Pemerintah bersifat responsive dan lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. pemerintahjuga lebih memahami cara yang terbaik untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Administration by public, adalah sebuah konsep yang orientasinya kepada pemberdayaan masyarakat. kemandirian dan kemampuan masyarakat lebih diutamakan. Pada proses ini pemerintah lebih berupaya untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk mengatur kehidupannya tanpa terus bergantung kepada pemerintah.

2.3 Kajian Terhadap *Middle Theory*

2.3.1 Pengertian Implementasi

Secara etimologis, implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi memiliki arti pelaksanaan/penerapan. Menurut Grindle, implementasi ialah proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Ia juga menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan,program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap serta telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Sedangkan menurut Van Meter dan Horn berpendapat bahwa implemetasi kebijakan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut (Syaukani *et al*., n.d.) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga

kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana mengahantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut prilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005 : 65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan, yakni kejadian – kejadian dan kegiatan – kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman – pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha – usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian – kejadian.

Syukur dalam Surmayadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan

ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur prilaku kelompok sasaran (target group). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor. Dalam praktiknya, implementasi sering menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya, serta hambatan birokrasi. Oleh karena itu, proses implementasi harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan situasi. Evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan memahami teori dan faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi, suatu kebijakan atau program dapat lebih efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses pelaksanaan kebijakan atau program yang telah dirumuskan sebelumnya, dengan melibatkan berbagai sumber daya seperti manusia, dana, sarana, dan lembaga pelaksana, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif. Proses ini tidak hanya mencakup tindakan administratif, tetapi juga interaksi antara berbagai aktor dan kekuatan politik, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan di tingkat masyarakat. Implementasi membutuhkan kesiapan, koordinasi,

serta evaluasi berkelanjutan agar dapat menimbulkan dampak nyata dan memberikan manfaat bagi kelompok sasaran.

2.3.2 Pengertian Implemtasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari perumusan strategi, alokasi sumber daya, hingga pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan menjadi tahap krusial karena tanpa eksekusi yang efektif, kebijakan yang baik sekalipun tidak akan memberikan dampak yang diharapkan bagi masyarakat atau organisasi.

Secara teoritis, implementasi kebijakan dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan. Salah satu teori yang berpengaruh adalah teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III (1980), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada empat faktor utama :

1. Komunikasi

   Edwards III menjelaskan bahwa :

   "*For implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personel, and they must be clear, accurate, and consistent. If the policies decision – makers wish to see implemented are not clearly specified, they may be misunderstood by those at whom they are directed. Obviously, confusion by implementers abaout what to do increases the chances that they will not implement a policy as those who passed or ordered it intended*".

   Implementasi akan berjalan secara efektif apabila ukuran – ukuran dan tujuan – tujuan kebijakan dapat dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran

dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu untuk dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.

Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu untuk dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan dari suatu kebijakan tersebut. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit.

Dalam tataran inilah maka faktor komunikasi dalam bentuk vertikal memegang peran penting agar implementor kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Hal ini menjadi prasyarat agar pesan dan perintah kebijakan harus dikomunikasikan dengan perintah yang jelas dari atasan kepada implementor kebijakan, sehingga implementasi kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki.

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

a. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi implementasi tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
b. Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi kebijakan, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan

fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah – ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan

2. Sumber Daya

Edwards III menjelaskan :

"*Important resourches include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation; the authority to ensure the policies are carried out as they are intended; and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide services. Insufficient resourches will mean that laws will not be enforced, serviced will not be provided, and reasonable regulations will not be developed*".

Meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber – sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas – fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan Undang – Undang. Kenyataan di lapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu.

Kebutuhan yang diperlukan para pelaksana di lapangan. Kekurangan informasi atau pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggung jawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, membelanjakan/mengatur kewenangan keuangan, untuk baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Edwards III menjelaskan :

"*The dispositions or attitudes of implementations is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. If implementation is to proceed effectively, not only muct implementers know what to do and have capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Most implementors can exercise considerable discretion in the implementation in policies. One of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. Another reason is the complecity of the policies themselves. The way in which implementers exercise their dicretion, however, depends in large part upon their dispositions toward the policies. Their attitudes, in turn, will be influenced*

by their views toward the policies per se and by how they see the policies effecting their organizational and personal intersts".

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian – bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan, kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang – orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka

mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

4. Struktur Birokrasi

Edwards III menjelaskkan :

"*Even If sufficient resourches to implement a policy exist and implementers know what to do and want to do it, implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure. Organizational fragmentation may hinder the coordination necessary to implement successfully a complex policy requiring the cooperation of many people, and it may also waste scarce resourches, inhibit change, create confusion, lead to policies working at cross – purposes, and result in important functions being overlooked*".

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red – tape yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang jelas dan konsisten sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini meliputi pemahaman yang baik tentang tujuan dan ukuran kebijakan, serta transmisi yang baik dari informasi kebijakan. Salah

pengertian dan ketidakjelasan informasi dapat menghambat implementasi. Implementasi kebijakan memerlukan sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, keuangan, informasi, dan fasilitas. Kekurangan sumber daya dapat menghambat implementasi kebijakan, bahkan jika komunikasi tentang kebijakan sudah jelas. Sikap dan karakteristik implementor kebijakan, seperti komitmen dan dukungan, juga mempengaruhi efektivitas implementasi. Kesadaran, dukungan, dan komitmen dari implementor sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan proses pelaksanaan keputusan atau program yang telah dirumuskan oleh pemerintah atau organisasi, yang bertujuan untuk mencapai hasil yang konkret dan bermanfaat bagi masyarakat, melalui tahapan komunikasi yang jelas, penyediaan sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana, serta dukungan struktur birokrasi yang efektif.

Selain itu, struktur organisasi dan SOP yang jelas memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Struktur yang panjang dan prosedur birokrasi yang rumit dapat menghambat fleksibilitas dan efektivitas implementasi. Jadi, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya tergantung pada satu faktor, tetapi dipengaruhi oleh interaksi antara komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, disposisi implementor, dan struktur organisasi yang mendukung).

2.3.3 Pengertian Perpustakaan

Kata perpustakaan berasal dari kata library yang berarti buku – buku, kitab primbon. Perpustakaan adalah ruangan, bagian dari suatu bangunan, atau bangunan

itu sendiri, yang digunakan untuk menampung buku – buku dan terbitan lainnya, biasanya sesuai dengan penyimpanan tertentu untuk keperluan tertentu yang digunakan pembaca dan tidak untuk dijual (Primasari *et al*., n.d.).

Menurut Sutarno (2008 : 163) perpustakaan merupakan unit kerja yang mengelola koleksi dan informasi untuk dipergunakan masyarakat pemustaka.Pada dasarnya perpustakaan merupakan instansi yang bertujuan untuk memberikan layanan informasi kepada pemustaka yang membutuhkan. Sedangkan perpustakaan menurut Darmono (2001: 2) salah satu unit kerja yang berupa tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi bahan pustaka secara sistematisuntuk digunakan oleh pemustaka sebagai sumber informasi sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan.

Beberapa ahli mendefinisikan perpustakaan sebagai berikut:

1. Menurut Ibrahim Bafadal, Perpustakaan adalah suatu lembaga atau badan tertentu yang mengelola buku – buku atau berupa bahan pustaka lainnya maupun selain buku seperti surat kabar, majalah dan lain sebagainya yang disusun, disimpan dan diatur secara teratur menurut sistem sehingga memudahkan pembaca untuk mencari sebuah buku yang diinginkan dan dapat digunakan oleh setiap pemakainya sebagai sumber informasi (Bafadal, 2016:3).
2. Menurut Ibnu Ahmad Saleh, Perpustakaan adalah tempat dimana koleksi perpustakaan atau koleksi perpustakaan disusun menurut sistem tertentu, sehingga dapat ditemukan dengan mudah dan cepat setiap kali dibutuhkan.
3. Menurut Wiji Suwarno, Perpustakaan adalah suatu ruangan yang merupakan bagian dari suatu bangunan, atau bangunan itu sendiri, yang

digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya, biasanya dalam suatu susunan, untuk penggunaan pembaca dan bukan untuk dijual.

Secara teoritis, perpustakaan dapat dijelaskan melalui berbagai pendekatan ilmiah. Salah satu lima hukum perpustakaan yang dikemukakan oleh S.R. Ranganathan (1931). Dalam teorinya, Ranganathan mengemukakan lima prinsip utama dalam manajemen perpustakaan, yaitu :

1. *Books are for use* (Buku untuk digunakan), Hukum yang pertama mengandung dasar bahwa buku ada untuk digunakan. Tigkat keterpakaian koleksi (buku) menjadi titik penekanan disini. Setiap bahan pustaka yang ada di perpustakaan haruslah terpakai. Hal ini juga menunjukkan bahwa seberapa jauh koleksi yang ada di perpustakaan telah memenuhi kebutuhan informasi penggunanya.
2. *Every reader his/her book* (Setiap pembaca bukunya), Hukum kedua bermakna bahwa setiap informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka harus tersedia di perpustakaan. Pengadaan harus mengakomodir kebutuhan pemustaka. Meski bagaimanapun juga tidak satupun orang dapat memiliki semua buku yang diinginkannya. Namun perpustakaan harus memiliki dan menyediakan bahan pustaka seharusnya sangat menguntungkan bagi pembaca dan bahkan para peneliti.
3. *Every book, its reader* (Setiap buku, pembacanya), Hukum ketiga menekankan pada open access atau layanan terbuka sebuah perpustakaan.hal ini bermakna bahwa setiap koleksi yang berada di perpustakaan haruslah dapat diakses oleh pemustaka. Dapat ditafsirkan bahwa setiap buku yang berada di perpustakaan pastilah memiliki pembacanya. Sehingga jika terdapat koleksi yang tidak dapat

ditemukan, maka menjadi tugas pustakawan untuk menemukan dan mempercepat akses terhadap informasi tersebut.

4. *Save the time of the reader* (Menghemat waktu pembaca), Hukum yang keempat menekankan pada kecepatan akses terhadap koleksi yang berada di perpustakaan. Perpustakaan tidak boleh menyianyakan dan membuang waktu pemustaka untuk mencari buku dalam waktu yang lama. Pengolahan bahan pustaka yang tepat dan infrastruktur pendukung menjadi salah satu kunci utama dalam hal kecepatan temu kembali informasi ini.
5. *A library is a growing organism* (Perpustakaan adalah organisme yang berkembang), organisme yang berkembang, Hukum kelima memberitahu kepada kita, bahwa yang terpenting dari perpustakaan adalah bahwa perpustakaan itu selalu tumbuh dan berkembang serta berubah dan akan selalu mengalami hal seperti itu. Perpustakaan mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya teknologi dan tuntutan kebutuhan informasi pengguna. Apabila perpustakaan tidak berkembang tentulah perpustakan tidak akan bisa memenuhi fungsinya sebagai penyedia informasi. Disisi lain perpustakaan yang statis akan ditinggalkan penggunanya.

Dapat disimpulkan bahwa perpustakaan adalah sebuah lembaga atau tempat yang secara sistematis mengelola, menyimpan, dan menyediakan berbagai bahan pustaka seperti buku, majalah, dan sumber informasi lainnya, guna memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, dan penelitian para pemustaka dengan cara yang mudah diakses, efisien, serta terus berkembang mengikuti kemajuan zaman.

Tujuan dan Fungsi Perpustakaan

Perpustakaan memiliki tujuan utama sebagai pusat informasi dan ilmu pengetahuan yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Sebagai institusi yang menyediakan berbagai sumber daya, perpustakaan bertujuan untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan pembelajaran sepanjang hayat. Selain itu, tujuan perpustakaan yang berdasarkan UU No. 43 Tahun 2007 menjelaskan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fungsi perpustakaan berdasarkan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan: Perpustakaan sebagai sarana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan hiburan untuk meningkatkan kecerdasan dan kemampuan bangsa.

2.3.4 Pengertian Perpustakaan Keliling

Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang mengunjungi pembaca dengan sarana dan prasarana perpustakaan keliling yaitu mobil dan motor. Perpustakaan keliling bertujuan untuk memperluas layanan perpustakaan hingga ke masyarakat yang tidak terjangkau oleh perpustakaan tetap. Layanan ini juga ditujukan bagi mereka yang tidak bisa datang ke perpustakaan karena kondisi tertentu. Selain itu, perpustakaan keliling juga berperan dalam mengenalkan perpustakaan dan meningkatkan minat baca. Sasaran layanannya meliputi masyarakat di desa – desa terpencil yang sulit dijangkau, dan sekolah – sekolah yang belum didatangi oleh perpustakaan keliling. Menurut Sutarno Perpustakaan keliling merupakan perluasan layanan (ekstensi) dari perpustakaan umum kabupaten/kota.

Perpustakaan keliling memberikan layanan dengan datang langsung ke tempat tinggal atau lokasi kegiatan masyarakat, sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Layanan ini dilakukan dengan kerja sama antara perpustakaan, masyarakat, dan OPD yang terkait. Agar layanan berjalan lancar, perlu didukung oleh kendaraan yang layak, petugas yang ramah dan siap membantu, serta penentuan lokasi dan waktu layanan yang tepat.

Tujuan dan fungsi Perpustakaan Keliling

Penyelenggaraan perpustakaan keliling bertujuan bukan saja untuk mengembangkan layanan perpustakaan, tetapi juga sebagai sarana untuk:

2.1 Melakukan penelitian tentang minat baca dan mengetahui respon Masyarakat yang bersangkutan kepada perpustakaan

2.2 Untuk melakukan promosi

2.3 Untuk menarik perhatian masyarakat serta

2.4 Untuk mempelajari apakah di suatu tempat tersebut sudah waktunya untuk dibangun sebuah perpustakaan cabang karena masyarakatnya sudah membutuhkan.

2.4 Kajian Terhadap Operasional Theory

Implementasi kebijakan program Perpustakaan Keliling di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung dapat dianalisis menggunakan teori George C. Edwards III, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama:

1. Komunikasi, Komunikasi adalah faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan, karena menentukan bagaimana informasi mengenai kebijakan disampaikan dari pembuat kebijakan ke pelaksana dan masyarakat.

Dalam konteks Perpustakaan Keliling Kota Bandung, komunikasi yang efektif diperlukan agar informasi mengenai layanan ini dapat tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat. Sosialisasi program perlu dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, website resmi pemerintah, serta pengumuman langsung melalui sekolah dan komunitas literasi. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, masyarakat mungkin tidak mengetahui keberadaan layanan ini, sehingga tujuan utama meningkatkan literasi tidak dapat tercapai secara maksimal.

2. Sumber Daya, Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada sumber daya yang tersedia, baik dari segi tenaga kerja, anggaran, maupun sarana dan prasarana. Dalam program Perpustakaan Keliling Kota Bandung, ketersediaan mobil perpustakaan yang cukup, koleksi buku yang beragam dan berkualitas, serta tenaga pustakawan yang kompeten menjadi elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan. Jika sumber daya ini tidak mencukupi, maka layanan yang diberikan tidak akan optimal. Sebagai contoh, jika jumlah kendaraan perpustakaan keliling terbatas, cakupan wilayah yang dapat dijangkau pun menjadi lebih sedikit, sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan akses layanan ini.
3. Disposisi (Sikap Pelaksana), Disposisi merujuk pada sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Dalam implementasi program Perpustakaan Keliling Kota Bandung, keberhasilan program ini sangat bergantung pada dedikasi pustakawan, pengelola perpustakaan, serta petugas lapangan yang menjalankan operasional sehari – hari. Jika pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang kuat mengenai

pentingnya literasi bagi masyarakat dan memiliki semangat dalam menjalankan tugasnya, maka program ini akan lebih efektif. Sebaliknya, jika terdapat resistensi dari para pelaksana akibat kurangnya motivasi atau minimnya dukungan dari pemerintah, maka kebijakan ini tidak akan berjalan secara maksimal.

4. Struktur Birokrasi, Struktur birokrasi memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif. Struktur yang terlalu kompleks dan prosedur yang berbelit – belit dapat memperlambat pelaksanaan kebijakan, sementara struktur yang fleksibel dan efisien akan mempercepat pencapaian tujuan program. Dalam implementasi program Perpustakaan Keliling di Kota Bandung, regulasi yang mengatur koordinasi antara Dinas Arsip dan Perpustakaan dengan instansi terkait harus jelas dan tidak membingungkan, karena aturan yang terlalu kaku atau tumpang tindih dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan berdampak pada keterlambatan layanan bagi masyarakat. Untuk mengatasi hambatan birokrasi, pemerintah Kota Bandung perlu menyederhanakan prosedur operasional dan memperbaiki sistem administrasi yang berkaitan dengan layanan perpustakaan keliling. Digitalisasi sistem administrasi, seperti penggunaan sistem pencatatan dan pelaporan berbasis daring, dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan program. Selain itu, pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kebijakan ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa struktur birokrasi yang ada tidak menghambat, tetapi justru mendukung kelancaran implementasi program perpustakaan keliling. Dengan birokrasi yang lebih responsif dan efisien, program ini dapat

berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan akses literasi.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan program Perpustakaan Keliling di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh kejelasan komunikasi, ketersediaan sumber daya yang memadai, sikap dan komitmen para pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung. Keempat faktor tersebut harus berjalan secara sinergis agar program ini dapat terlaksana secara efektif dan menjangkau masyarakat secara luas. Tanpa komunikasi yang tepat, sumber daya yang cukup, pelaksana yang berdedikasi, dan sistem birokrasi yang efisien, tujuan utama program dalam meningkatkan literasi masyarakat akan sulit tercapai secara optimal.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta – fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep – konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran variabel – variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.

Kerangka berpikir merupakan perlengkapan peneliti untuk menganalisa perencanaan dan beragumentasi kecenderungan asumsi ke mana akan dilabuhkan, penelitian kuantitatif kecenderungan akhirnya adalah diterima atau ditolak hipotesis penelitian tersebut, sedangkan penelitian yang berebentuk pernyataan atau narasi – narasi peneliti bertolak dari data dan memanfaatkan teori yang digunakan sebagai bahan penjelasan dan berakhir dengan pembaharuan suatu pernyataan.

Pada penelitian ini, peneliti mendasari kerangka berpikir dari sebuah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

a. Komunikasi, yaitu berkenaan dengan proses penyampaian informasi mengenai kebijakan kepada pihak pelaksana dan masyarakat secara jelas, konsisten, dan efektif. Tujuannya agar seluruh pihak yang terlibat memahami dengan tepat apa yang harus dilakukan sehingga implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

   Dalam dimensi ini terdapat indikator didalamnya yaitu:

   1) Kualitas sosialisasi kebijakan
   2) Efektivitas komunikasi
   3) Konsistensi yang disampaikan

b. Sumber daya, yaitu berkenaan dengan ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya manusia, keuangan, fasilitas, dan informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Tujuannya untuk memastikan bahwa implementasi program dapat berjalan secara optimal dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

   Dalam dimensi ini terdapat indikator didalamnya yaitu:

   1) Kompetensi sumber daya manusia
   2) Kesiapan teknologi
   3) Peningkatan sarana dan prasarana

c. Disposisi, yaitu berkenaan dengan sikap, komitmen, dan kesediaan para pelaksana dalam mendukung dan menjalankan kebijakan sesuai dengan

yang diharapkan. Tujuannya agar pelaksana memiliki motivasi dan semangat yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat.

Dalam dimensi ini terdapat indikator didalamnya yaitu:

1) Pemahaman dan komitmen pelaksana
2) Akuntabilitas kinerja
3) Pemahaman terhadap kebijakan

d. Struktur Birokrasi, yaitu berkenaan dengan organisasi, prosedur operasional, dan tata kelola yang mengatur pelaksanaan kebijakan. Tujuannya untuk menciptakan koordinasi yang efektif dan memperjelas tugas serta tanggung jawab setiap pihak dalam pelaksanaan program.

Dalam dimensi ini terdapat indikator didalamnya yaitu:

1) Pemahaman Standar Operating Procedurs (SOP)
2) Koordinasi antar unit organisasi
3) Sistem monitoring evaluasi

Diagram Kerangka Pemikiran

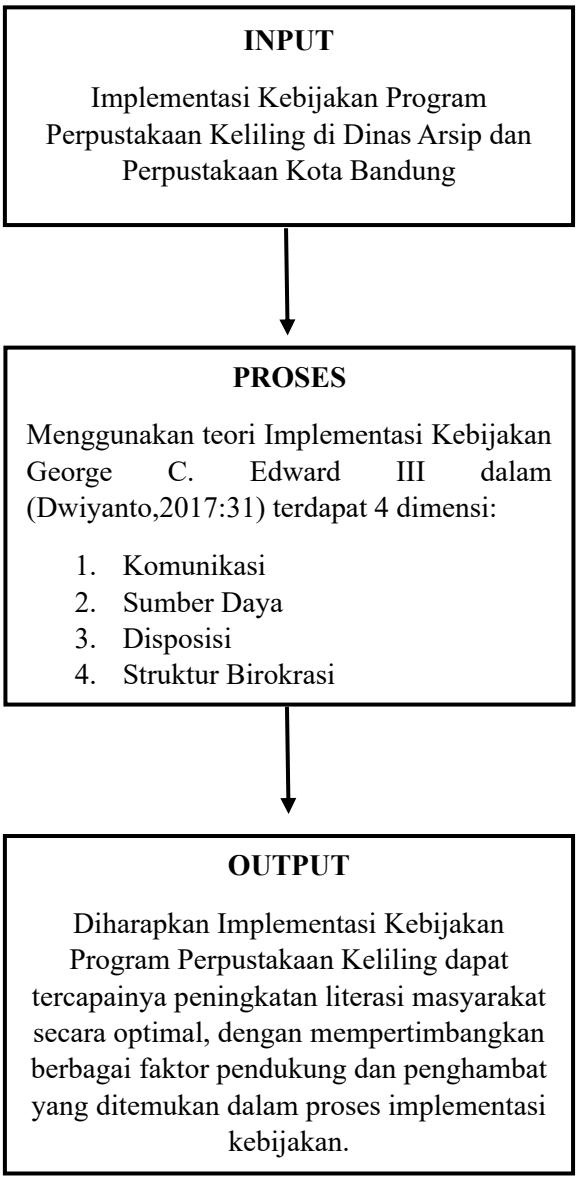

Gambar 2. 1 Alur Kerangka Berpikir

(Sumber: Peneliti 2025)

2.6 Proposisi

Proposisi disusun berdasarkan tiga fokus utama implementasi kebijakan, faktor pendukung, dan faktor penghambat, dalam konteks implementasi kebijakan program perpustakaan keliling Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Proposisi dalam penelitian ini berdasarkan pada rumusan permasalahan yang berlandaskan pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam (Dwiyanto, 2017:31) komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Program Perpustakaan Keliling di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung dalam memberikan peningkatan literasi di masyarakat melalui program perpustakaan keliling masih terdapat beberapa tantangan akibat kurangnya optimalisasi program ini. Pada dimensi komunikasi, sosialisasi program belum merata dan komunikasi antar pelaksana kurang efektif. Dimensi sumber daya, menunjukkan masih terbatasnya armada, kurangnya fasilitas pendukung, serta SDM yang belum kompeten. Pada disposisi, pelaksana belum sepenuhnya memahami tujuan program dan kurang memiliki motivasi dalam pelaksanaannya. Sementara itu, pada struktur birokrasi, yang cenderung kaku sering kali menghambat inovasi dan responsivitas terhadapat kebutuhan masyarakat.
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Perpustakaan Keliling di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung dapat dianalisis melalui empat dimensi implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor pendukung program ini meliputi komitmen dari sebagian pelaksana, adanya layanan yang responsive terhadap kebutuhan masyarakat, serta partisipasi Masyarakat terhadap kegiatan

literasi yang disediakan. Di sisi lain, faktor penghambat yang ditemukan mencakup belum meratanya keterbatasan Sumber Daya Manusia, keterbatasan jumlah armada, dan belum optimalnya koordinasi dan sistem evaluasi. Keberhasilan implementasi kebijakan perpustakaan keliling sangat dipengaruhi oleh bagaimana faktor pendukung dimaksimalkan dan faktor penghambat diminimalkan dalam proses pelaksanaanya.